

# KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KETIGA JUNI 2011

Pada 9 Mei 2011 DPR memulai Masa Persidangan IV tahun 2010-2011 setelah melewati Masa Reses III tahun 2010-2011. Konsentrasi kegiatan Dewan tetap pada pelaksanaan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu ketiga Juni 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

## Anggaran

Badan Anggaran telah menetapkan jadwal pembahasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dan Pembicaraan Pendahuluan Dalam Rangka Penyusunan RAPBN 2012, yaitu dengan dimulainya **Rapat Kerja Badan Anggaran** dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu, tanggal 1 Juni 2011. Adapun substansi pembahasan antara lain: [1] Penyampaian RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN 2012; [2] Pembentukan **Panja**, yaitu: Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2012; **Panja** RKP 2012 dan Prioritas Anggaran; **Panja** Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2012; dan **Panja** Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN 2012.



bekerja pada tanggal 13-16 Juni 2011, dimulai dengan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan 2012 dan Panja RKP 2012 dan Prioritas Anggaran 2012.

Sesuai dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 ditetapkan tujuan dari negara adalah menjadi "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Untuk menindaklanjuti RPJPN tersebut dijabarkan dalam visi Presiden untuk kurun waktu lima tahun 2010-2012 dengan visi "Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan". Dan selanjutnya untuk tahun 2012 ini Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah dengan Tema "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

selanjutnya untuk tahun 2012 ini Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah dengan Tema "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Selanjutnya diberikan waktu kepada masing-masing Komisi dan Pasangan Kerjanya selama satu minggu, 6-10 Juni 2012 untuk membahas RKA-KL dan RKP K/L 2012 dan selanjutnya diserahkan kepada Badan Anggaran untuk direkapitulasi. Disamping itu, ditugaskan kepada Komisi VII dan XI untuk membahas Asumsi Ekonomi Makro dengan Pasangan Kerjanya dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Anggaran untuk pembahasan lebih lanjut. Hasil pembahasan Komisi XI tentang asumsi makro Ekonomi RAPBN 2012 menyepakati besarnya sesuai tabel.

Indikator Makro Ekonomi	Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6-7,0
Inflasi (%)	4,0-5,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	8.600-9.100
Suku Bunga SPN 3 bln (%)	5,5-6,75

Panja-Panja Badan Anggaran dijadwalkan mulai

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014, yang disampaikan oleh Pemerintah untuk dibahas

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Helmizar **PIMPINAN REDAKSI**: Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER**: Eka Hindra **PENANGGUNGJAWAB FOTO**: Rizka Arinindya **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

bersama-sama dengan DPR, antara lain: [1] Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; [2] Pendidikan; [3] Kesehatan; [4] Penanggulangan Kemiskinan; [5] Ketahanan Pangan; [6] Infrastruktur; [7] Iklim Investasi dan Iklim Usaha; [8] Energi; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; [9] Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; [10] Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Prioritas lainnya adalah: [1] Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; [2] Bidang Perekonomian; [3] Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Adapun prakarsa-prakarsa baru meliputi: [1] Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi; [2] Percepatan Pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT; [3] Program Kluster Ke-4; [5] Pangan, Transportasi Kota Besar, Lapangan Kerja.

## Legislasi

[1] Pada masa sidang ini sudah dapat dipastikan satu (1) RUU lagi memasuki pembicaraan tingkat II, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. RUU ini akan dirapatparipurnakan pada 21 Juni 2011. RUU ini ditangani oleh Badan Legislasi DPR. Dalam kegiatannya, Baleg telah melakukan 4 (empat) kali Raker dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Intensitas pembahasan telah dilakukan melalui rapat-rapat Panja dengan Pemerintah, dan rapat terakhir pada 18 Mei yang lalu.

[2] DPR juga sedang mengefektifkan pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembahasan RUU ini telah dimulai sejak Masa Sidang II tahun sidang 2010-2011. Pada pembahasan Masa Sidang II ada perbedaan prinsip terhadap substansi-substansi materi antara DPR dan Pemerintah yaitu: [a] Apakah RUU BPJS bersifat penetapan saja atau bersifat penetapan dan pengaturan; [b] Bentuk Badan Hukum BPJS, apakah BUMN, BUMN Khusus atau Badan Hukum Publik; [c] Apakah akan dibentuk 1 (satu) BPJS yang menjalankan seluruh jaminan sosial (BPJS tunggal) atau dibentuk beberapa BPJS (BPJS multi).

Pembahasan atas RUU ini dilanjutkan pada pada Masa Sidang III. Pada masa sidang ini, karena tidak ada titik temu atas materi-materi yang krusial antara DPR dan pemerintah, maka rapat-rapat selanjutnya dilakukan melalui beberapa kali rapat konsultasi, baik antara DPR dan Pemerintah, maupun rapat konsultasi yang dipimpin oleh pimpinan Dewan.

Pada Masa Sidang IV, pembahasannya diefektifkan dengan masuknya DIM baru dari Pemerintah. Dilaporkan

oleh Pansus, masalah-masalah krusial sudah mengerucut. Yang pasti, baik DPR maupun Pemerintah memiliki tekad yang sama agar RUU ini dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Tata Tertib DPR. Hadirnya UU BPJS ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap program jaminan sosial negara yang sejak kemerdekaan hingga akhir Orde Baru belum dapat dilaksanakan sebagaimana amanat konstitusi. RUU ini ditargetkan pada Masa Sidang IV.

[3] RUU tentang Keamanan Nasional yang disampaikan Presiden dengan surat tertanggal 23 Mei 2011, oleh keputusan Rapat Bamus tanggal 16 Juni, diserahkan kepada Komisi I untuk menanganinya. Presiden telah menunjuk Menhan, Mendagri, dan Menkumham, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama mewakili Pemerintah. RUU ini dimaksudkan untuk menciptakan keamanan nasional yang



Anggota Baleg menandatangani RUU Mahkamah Konstitusi

kondusif dan komprehensif, yang bukan hanya merupakan tanggungjawab TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, melainkan juga melibatkan seluruh instansi Pemerintah terkait, dan peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung.

## Pengawasan

Fungsi pengawasan DPR dilakukan melalui AKD Komisi dan Tim-Tim yang telah dibentuk, antara lain Tim Pengawas Kasus Bank Century. Dalam Rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century dengan penegak hukum, yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan pada 15 Juni dengan agenda melanjutkan rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century minggu sebelum-

nya. Dalam rapat ini, KPK melaporkan bahwa sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum pada kasus Bank Century. Karena penjelasan KPI ini, maka Tim Pengawas berpendapat bahwa apa yang disampaikan KPK bertentangan dengan hasil keputusan Pengadilan Jakarta Pusat. Dengan demikian ada perbedaan persepsi di dalam kasus Bank Century antara KPK dengan Tim Pengawas. Oleh karena itu, perlu dilakukan cross examination

mendesak Kapolri untuk mengkaji kembali strategi pemberantasan terorisme dan penyalahgunaan narkoba dengan mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif hingga ke akar permasalahannya dengan hasil yang terukur. [2] Komisi III mendesak Kapolri untuk memperhatikan aspek netralitas dan cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan MK terkait dugaan keterlibatan salah seorang mantan Komisioner KPU dalam perkara pemalsuan Surat MK



jajaran KPK, POLRI dan Kejaksaan menghadiri rapat tim pengawas kasus Century

antara Tim Pengawas dengan KPK, dan ditawarkan oleh Pimpinan KPK, kegiatan ini akan dilakukan minggu depan di Kantor KPK dengan data-data lengkap yang dimiliki oleh KPK. Kesimpulan rapat adalah, Tim pengawas Century menyetujui tawaran KPK untuk melakukan cross examination data mengenai kasus Bank Century di Kantor KPK dengan mengundang Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK dengan tetap dipimpin oleh Pimpinan DPR selaku pimpinan Tim Pengawas.

Adapun hasil Raker Komisi-Komisi, antara lain dilakukan oleh Komisi II. Telah dilakukan RDP dengan Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, 14 Juni 2011. Kesimpulannya, [1] Komisi II menilai kinerja KPU dan jajarannya, baik secara teknis, administrative dan substantif, terdapat banyak kelemahan sehingga menimbulkan masalah dalam penetapan calon terpilih Anggota DPR-RI hasil Pemilu 2009. Oleh karenanya Komisi II meminta agar KPU memperbaiki dan menaati mekanisme kerja yang berlaku dan segera menindaklanjuti penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di masa yang akan datang. [2] Komisi II mendorong upaya penyelesaian secara hukum penanganan kasus dugaan pemalsuan surat MK No. 112/PAN.MK/VIII/2009. [3] Komisi II akan membentuk Panja guna mendalami persoalan kinerja KPU dan bawaslu dalam proses penetapan calon terpilih anggota DPR hasil pemilu 2009 termasuk meminta klarifikasi kepada MK sebagai abhan dalam menentukan langkah kebijakan bidang pengawasan dan bidang legislasi dalam perumusan RUU tentang perubahan atas RUU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu.

Pada Rapat kerja Komisi III DPR-RI dengan Kapolri, 13 Juni 2011, disimpulkan sebagai berikut: [1] Komisi III

serta laporan panda Nababan tentang rekayasa dan data penanganan perkaranya di KPK.

## Diplomasi Parlemen

Pertemuan k-8 AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace (AIFOCOM) telah berlangsung pada tanggal 25-29 Mei 2011 di Phnom Pen, Kamboja. Pertemuan tersebut bertujuan untuk saling berbagi informasi dan membahas laporan pertama AIPA Caucus tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan obat-obat terlarang. Delegasi DPR-RI dipimpin oleh Azwar abubakar (BKSAP) dan Roestanto Wahidi. Pada pertemuan ini juga dihadiri oleh Komisasris Jenderal Polisi Gorries Mere (Kepala BNN) selaku Chairman ASEAN Officials on Drug matters (ASOD), Perwakilan United nation Office on Drug and Crime in Cambodia (UNODC), serta wakil-wakil dari Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda Kamboja dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja.

Masing-masing delegasi menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan permasalahan illicit drugs dan upaya yang telah dilakukan dalam kerjasama di kawasan ASEAN dan internasional dalam rangka mencapai visi ASEAN Drug Free 2015. Penyelundupan illegal drugs terus menjadi ancaman yang serius bagi keamanan nasional, regional, global. Menurut laporan UNODC 2010, terjadi peningkatan yang signifikan peredaran illegal drugs seperti opium dan cocaine menuju kawasan negara berkembang. Disamping itu, perdagangan illegal drugs menyangkut amphetamine (ATS) diproduksi secara local dan mudah dibeli dari pasar karena diekstrak dari pseudomedical substance dan crystalline form.

# RUU MK Berhasil Diputuskan Di Baleg

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM berhasil mengambil keputusan Tingkat I terhadap Perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Rapat yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Selasa (14/6) selain dihadiri jajaran Kementerian Hukum dan HAM juga dihadiri Perwakilan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sebelum Pengambilan Keputusan Tingkat I ini dilakukan, rapat sempat diskors selama lebih kurang 30 menit, karena masih belum ada kata sepakat terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah mengajukan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Tujuh Fraksi yaitu F-PD, F-PDI Perjuangan, F-PAN, F-PPP, F-PKS, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura menyetujui jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK 2 tahun 6 bulan.

Namun, terhadap masa jabatan ini Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB menolak usulan Pemerintah tersebut dan mengusulkan, masa jabatan 5 (lima) tahun.

Alasan Fraksi Partai Golkar mengusulkan lima tahun menurut Ferdiansyah, hal ini terkait dengan adaptasi yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua MK. Apabila seorang pimpinan hanya memiliki masa jabatan dua tahun enam bulan, bagaimana Ketua dan Wakil Ketua tersebut melakukan adaptasi dengan batas waktu yang singkat.

Selain itu, menyangkut beban kerja dan wewenang MK yang cukup berat dalam konteks analisa jabatan, waktu dua tahun enam bulan dirasa berat untuk Ketua dan Wakil Ketua MK terpilih. Walaupun, katanya, dimungkinkan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali.

Setelah dilakukan lobi, akhirnya disepakati masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK 2 tahun 6 bulan. Terhadap pasal-pasal lain yang belum disepakati juga telah mencapai kata sepakat pendidikan hakim MK S1 Sarjana Hukum, dan S2, S3 tidak harus dari hukum.

Selain itu, MK masih menangani Pilkada, kecuali UU Nomor 10 Tahun



Suasana Rapat Pleno Baleg DPR dengan Menteri Hukum dan HAM

2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD menghapus kewenangan MK menangani sengketa Pilkada.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara yang ditangani hakim MK. Dalam Rancangan Undang-Undang ini disepakati MK tidak dapat mengeluarkan putusan yang sifatnya ultra petita atau memutus sesuatu di luar permohonan pemohon.

“Kewenangan MK harus dibatasi. Tidak boleh ada satu pun lembaga yang kewenangannya tak dibatasi karena ini negara hukum. Apa yang diminta itu yang diputuskan. Jangan apa yang tidak diminta itu diputuskan,” kata Patrialis.

Larangan MK untuk membuat putusan ultra petita tersebut tercantum pada Pasal 45A RUU MK. Pasal itu menegaskan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.

Patrialis menjelaskan kesepakatan mengenai hal itu ditujukan untuk

mengembalikan fungsi MK sebagaimana diatur dalam konstitusi. MK, kata Patrialis, hanya bisa memutus apakah sebuah UU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak. Bahkan, Patrialis mengatakan apabila MK melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik.

“Tapi kalau pokok perkara tidak bisa dijatuhkan. Kalau putusannya tetap dan tidak bisa diganggu. Itu berkaitan dengan kekuasaan lembaga kehakiman,” katanya. Apabila keluar dari yang ditentukan tersebut, maka MK juga dapat dipertanyakan kenegawanannya.

Sementara Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono menambahkan perubahan lain dari UU MK adalah komposisi Majelis Kehormatan MK. Nantinya, Majelis Etik bagi MK ini juga akan melibatkan satu unsur dari DPR. MK, juga diisi oleh unsur Komisi Yudisial (KY), pemerintah, hakim agung, dan hakim konstitusi, masing-masing seorang. “Hakim MK itu ada tiga yang dari DPR, karena itu perlu ada pengawas yang dari DPR, biar seimbang,” katanya.

Sebelumnya, komposisi Majelis Kehormatan diisi dua orang hakim



Penandatanganan RUU MK terhadap perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang MK

MK, seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pemimpin lembaga tinggi negara. Menurut politikus Partai Demokrat ini masuknya unsur DPR dalam keanggotaan Majelis Kehormatan bertujuan untuk menyeimbangkan lembaga pengawas kode etik hakim MK tersebut.

Selain hal di atas, perubahan lain dalam RUU MK adalah perpanjangan usia pensiun Hakim MK. Apabila sebelumnya pensiun ditetapkan 67 tahun, maka ke depannya diperpanjang menjadi 70 tahun. (tt) foto:ry/parle

# Ketua DPR Setuju RUU Desa Cepat Disahkan

Undang-undang Desa itu memang sangat diperlukan dan harus ada, agar tidak terjadi lagi diskriminasi pembangunan antara desa yang satu dengan desa lainnya dan antara desa dengan kota. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR, Marzuki Alie yang di damping oleh Mahrus Munir (F-PD) saat pertemuan dengan Asosiasi Kepala Desa se-Jawa Timur, Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (15/6).

“UU Desa itu harus ada, agar ada kepastian mengenai status Kepala Desa dan Perangkatnya, dan UU Desa ini juga bisa sebagai faktor penunjang pembangunan desa, agar pembangunan di desa dapat dilakukan secara merata. Karena kami pun ingin desa bisa maju, agar tidak ada lagi diskriminasi, perbedaan antara desa yang satu dengan lainnya maupun dengan kota,” jelasnya.

Pembangunan pedesaan yang ada saat ini memang tertinggal dibandingkan kota dan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dampak dari Pemilu. “Biasanya jika daerah yang calonnya menang dalam Pemilihan,



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat pertemuan dengan Asosiasi Kepala Desa se-Jawa Timur.

daerahnya akan cepat dibangun, sebaliknya jika calonnya kalah dalam pemilihan, maka akan terlupakan,” tambah Marzuki.

Perwakilan Asosiasi Kepala Desa se-Jawa Timur, Samitri menuturkan, Kepala Desa dan perangkat lainnya akan selalu melakukan pengawalan untuk pembentukan UU Desa ini. “Kami akan selalu melakukan pengawalan, agar Undang-undang Desa ini dapat segera disahkan dan sesuai dengan substansi yang kami sarankan, seperti memuat

kejelasan status kepala desa dan perangkatnya, masa jabatan kepala desa, APBN 5%-10%, dan lainnya,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Marzuki mengatakan DPR masih menunggu draft RUU tersebut dari pemerintah, karena hingga sekarang, draft tersebut belum ada di DPR. “Kami masih menunggu draft RUU Desa yang masih ada di pemerintah, sehingga sampai hari kami belum mengetahui bagaimana isi dari draft tersebut,” ungkapnya. (ra) foto:as/parle

# Rumah Aspirasi Cegah Praktek Calo Anggaran

Ketua DPR RI Marzuki Ali menyebut praktek percaloan anggaran terasa tapi tiada atau dengan kata lain sulit untuk dibuktikan. Beberapa langkah sudah dipikirkan untuk menghambat praktek seperti ini diantaranya dengan menyiapkan konsep Rumah Aspirasi DPR RI di setiap daerah pemilihan (dapil).



Ketua DPR RI Marzuki Ali saat pertemuan silaturahmi dengan jajaran redaksi harian Malut Post

“Rumah aspirasi itu bukan milik partai tapi milik negara. Disini pemda bisa meminta anggota DPR dari dapil terkait memperjuangkan anggaran daerah. Kalau itu dibicarakan lintas fraksi di rumah aspirasi maka perjuangan itu akan lebih terukur, terkoordinasi dengan baik. Tidak seperti sekarang anggota DPR menerima aspirasi sendiri-sendiri, kemudian perjuangan di Jakarta mentok karena saling bertempur diantara anggota dari dapil yang sama,” tegasnya saat bicara dalam pertemuan silaturahmi dengan jajaran redaksi harian Malut Post di Ternate, Sabtu (11/6/2011).

Marzuki menggambarkan 3 anggota DPR dari dapil Malut dapat berembuk dan kemudian membuat prioritas mana anggaran daerah yang patut diperjuangkan lebih awal. Baginya memperjuangkan anggaran daerah yang diwakilinya merupakan hak konstitusional wakil rakyat di parlemen. Keberadaan rumah aspirasi DPR RI di dapil akan menghambat para bupati, walikota ber-gerilya di Jakarta, melakukan lobi anggaran. Padahal rakyat memerlukan mereka di daerah.

Ide pembangunan rumah aspirasi ini menurut Ketua DPR beberapa waktu lalu tidak dapat berjalan karena dikritisi banyak pihak yang tidak me-

mahami permasalahan dengan benar. Setelah publik mengerti ia berjanji pada saatnya usulan ini akan kembali dibahas. Keberadaan rumah aspirasi di daerah akan mengoptimalkan upaya wakil rakyat menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Pengaturan hari kerja anggota DPR nantinya juga akan disesuaikan. Salah satu contoh yang bisa dijadikan referensi adalah anggota kongres Amerika yang membagi waktu kerja, Senin – Rabu bersidang di gedung parlemen, Kamis – Minggu berkantor di rumah aspirasi di dapil masing-masing. Dengan sistem ini Marzuki memproyeksikan akan terjadi penghematan anggaran negara sampai 1 persen, itu berarti 1 triliun rupiah lebih.

Redaktur surat kabar Malut Post, Ako La Owi yang menanyakan permasalahan calo anggaran di DPR menilai penjelasan tentang rumah aspirasi sangat logis. Ia berharap solusi ini dapat menghambat ruang gerak percaloan di DPR yang berdasarkan informasi yang diterimanya meminta fee sampai 10 persen dari anggaran yang diperjuangkan. Kondisi ini menurut La Owi jelas merugikan daerah.

Kunjungan yang Mengagetkan

Sementara itu Pimpinan Redaksi Malut Post, Mohammad Syadri me-

ngaku sangat tidak menduga Ketua DPR RI benar-benar akan mengunjungi kantornya. Ketika menerima informasi rencana kunjungan itu ia menanggapi dengan biasa karena sebelumnya sudah ada pejabat dari Jakarta yang berjanji akan datang. Tapi tidak pernah ada realisasinya.

“Sangat tidak terduga karena tidak ada pembicaraan sebelumnya inilah yang membedakan seorang ketua, Pak Marzuki Ali. Ini menunjukkan kapasitas sebagai seorang wakil rakyat, yang meluangkan waktu ketempat kami,” ujarnya mengawali pertemuan silaturahmi di ruang redaksi surat kabar terbesar di Malut ini.

Menjawab hal ini Ketua DPR menjelaskan dalam setiap kunjungan ke daerah ia selalu berusaha hadir di kantor media, silaturahmi dan berdiskusi tentang beberapa masalah negeri ini. Baginya media merupakan alat untuk menjaga proses demokrasi yang saat ini sedang di bangun. Ia menyebut media sebagai pilar keempat dari demokrasi, tanpa media demokrasi itu seperti sayur tanpa garam.

“Media alat kontrol bagi perjalanan demokrasi. Lembaga legislatif yang sangat powerful pasca reformasi tanpa kontrol dari media bisa menjadi lembaga yang selalu memanfaatkan kekuasaan bagi kepentingan kelompok atau golongan. Itu sangat tidak baik bagi perjalanan demokrasi. Lebih dari setahun setengah saya memimpin DPR, media itu sangat penting sekali,” imbuhnya.

Marzuki mengaku selalu berupaya membangun komunikasi dengan siapa saja, bukan karena besar kecil media, “Sekecil apapun media, dia paling tidak melakukan fungsinya sebagai media, jembatan informasi apakah itu sebagai jembatan pencerahan maupun kontrol.” Pada sisi lain politisi Partai

Demokrat ini mengingatkan, tulisan media itu sangat tajam dan mampu membangun opini masyarakat. Ia ber-

harap media juga melakukan introspeksi untuk mencegah terjadinya abuse of power dalam kebijakan pem-

beritaannya. Kondisi itu jelas tidak sehat bagi perjalanan demokrasi bangsa ini. (iky) foto:parle

## KPPU Tidak Tegak Terhadap Menjamurnya Minimarket

DPR menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak tegas dan tidak mampu memberikan sanksi terkait menjamurnya ribuan minimarket di tengah masyarakat yang berakibat menghancurkan pedagang maupun pasar tradisional sekitarnya.



Ketua Komisi VI, Nurdin Tampublon saat pimpin Rapat Dengar Pendapat dengan BKPM

Demikian pernyataan Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon saat ditemui Tim Parle usai memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM, Gita Wirjawan, Rabu (8/6).

“Jadi KPPU itu hanya mendapatkan temuan yang kemudian ditindaklanjuti kepada instansi yang bersangkutan dan kepada instansi penegak-penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan lahirnya KPPU tersebut,” jelasnya. Palsanya, KPPU tidak mempunyai wewenang yang besar dalam masalah penindakan, memberikan sanksi, denda ataupun penindakan secara hukum.

Menurut Nurdin, Komisi VI sudah memikirkan bagaimana memperkuat wewenang KPPU agar bisa melakukan penindakan, memberikan sanksi dan denda kepada yang melanggar aturan-

aturan persaingan usaha tersebut. “Karena KPPU adalah suatu komisi yang sangat potensial untuk menghilangkan persaingan usaha tidak sehat itu,” tambahnya.

Ia memberi contoh, kalau di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa Barat, Perancis, Jepang bahkan di China, Ketua KPPU setingkat dengan menteri dan ikut dalam sidang-sidang kabinet. “Jadi kalau ada persaingan tidak sehat suatu usaha mereka bisa bertindak sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan di ketentuan konstitusi mereka dan kuat dia,” tuturnya

Dia menambahkan, KPPU di Indonesia tidak memiliki wewenang yang besar, karena masih berada dibawah Kementerian perdagangan. “Bagaimana dia bisa bertindak kalau dia harus melapor kepada menteri perdag-

angan, yang diawasi adalah menteri perdagangan tetapi dia dibawah menteri perdagangan. Disitulah kelemahan daripada KPPU kita,” tegas Nurdin.

Seharusnya KPPU kita ini merupakan superbody seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia tidak dibawah menteri perdagangan, independen dan bertanggungjawab kepada DPR RI.

Politisi dari Partai Hanura tersebut mengatakan, Komisi VI sudah membicarakan masalah tersebut kepada menteri perdagangan dan sudah meminta kepada KPPU untuk membuat suatu program-program kearah penguatan wewenang mereka dan mampu berdiri sendiri. “Tetapi sampai saat ini belum ada realisasi penguatan daripada fungsi dan wewenang KPPU tersebut, karena itu KPPU kita sekarang ini sangat lemah sekali, tidak efektif dan tidak efisien,” ujarnya.

Nurdin berharap KPPU lebih independen dan tidak berada dibawah menteri perdagangan dan bertanggungjawab kepada DPR RI sebagaimana KPK tidak dibawah presiden.

Dia mengusulkan, wewenang KPPU harus ditingkatkan dan berada di seluruh ibukota provinsi maupun kabupaten/kota bertugas mengawasi persaingan perdagangan yang tidak sehat. “KPPU harus difasilitasi dengan baik dan diberikan anggaran yang lebih besar agar mereka bisa meningkatkan kinerja, SDM maupun fasilitasnya, yang jelas mereka harus mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, tindakan, sanksi, dan juga mencahut perizinan,” paparnya. (iw)/foto: iw/parle.

# Kekuatan DPR Sangat Besar

Amandemen terhadap UUD 1945 sudah 4 (empat) kali dilakukan, pergeseran kekuasaan dan adanya amanat konstitusi pada akhirnya membuat DPR memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar.

Ketua DPR RI Dr.H.Marzuki Alie menyampaikan hal tersebut dalam acara “Sekolah Parlemen” tingkat mahasiswa di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Kamis (16/6).

Ratusan Mahasiswa, Dosen, Rektor dan unsur Muspida kota Malang yang berkumpul di Aula Widya Loka dalam rangka kegiatan “Sekolah Parlemen” terkait Dies Natalies ke-7 FISIP UB, begitu antusias mendengarkan orasi ketua DPR RI. Marzuki menguraikan, bahwa DPR pada masa ORBA hanya merupakan Lembaga Stempel bagi pemerintah pada masa itu, tetapi setelah adanya reformasi pada tahun 1998 terjadi perubahan yang sangat drastis, dimana masyarakat memiliki kepercayaan dan harapan yang tinggi terhadap DPR,”ujarnya, disambut gempita mahasiswa di aula yang diresmikan oleh Mendikbud Fuad Hasan 4 Februari 1992.

Setelah 10 (sepuluh) tahun lebih masa reformasi, mulailah muncul masalah-masalah di DPR, harapan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi pada awalnya terhadap DPR, lambat laun menjadi berkurang. “Padahal DPR adalah lembaga hasil demokrasi yang dibangun dengan harta dan nyawa, semua akan menjadi sia-sia jika tidak dapat menjaga citra dan wibawa DPR,”lanjutnya.

Marzuki lalu menjelaskan, bahwa perjalanan DPR selama dua periode tidak dibangun dan dipersiapkan untuk mendukung adanya peralihan kekuasaan, ”Oleh sebab itu, untuk mendukung kinerja Dewan, kami menyiapkan Renstra (Rencana Strategis) yang dengan sangat jelas menjabarkan semua pelaksanaan tugas Dewan. Dalam Renstra tersebut terlihat begitu jelas, betapa DPR memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sangat besar”.

Selain hal tersebut, Marzuki juga menguraikan perlunya melakukan re-



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menjadi pembicara di acara Dies Natalies ke-7 FISIP Universitas Brawijaya



formasi dan restrukturisasi Sekretariat Jenderal. “Ke Setjenan saat ini memiliki kekuasaan yang sangat “power full”. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan perlu juga adanya perubahan di dalam struktur kesetjenan”,katanya.

Menjawab pertanyaan mahasiswa tentang keterkaitan antara pengala-

man politis dengan sikap Anggota Dewan, Marzuki menyatakan, “Tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan, saya tidak memiliki pengalaman di bidang legislasi, pengalaman saya dibidang politik hanya sebagai Sekjen partai, Kalau kita melihat negara besar seperti China, banyak sekali pemimpin



politik di negara tersebut yang berlatar belakang sebagai engineer, jadi yang tidak memiliki pengalaman politik jangan takut jika sewaktu waktu mendapat kepercayaan untuk memimpin lembaga politik”, ujarnya mememangati mahasiswa.

Dalam orasinya tersebut, Marzuki juga menyampaikan visi renstra DPR RI yang ingin mewujudkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dan mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Demi terwujudnya Visi Renstra DPR RI 2009-2014, tentunya kami didukung misi-misi penting yang sesuai dengan fungsi anggota DPR RI, untuk mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif, mewujudkan fungsi penganggaran Negara yang akuntabel dan transparan, mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, dan mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif,”terangnya.

Masih pada acara yang sama, Rek-

tor Universitas Brawijaya, Prof. DR. Ir. Yogi Sugito mengatakan, sekolah parlemen ini didesain dalam bentuk pelatihan agar mahasiswa dapat belajar secara langsung tentang bagaimana seorang anggota parlemen melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.

“Metode role playing dalam pelatihan ini akan dapat meningkatkan softskill bagi peserta dan softskill terbukti memainkan peran penting mengantarkan lulusan kita sukses mengembangkan karier dan profesi yang digelutinya,”tegasnya.

Yogi menambahkan, kegiatan ini dapat pula dimanfaatkan oleh DPR untuk membangun kembali citra positif DPR RI. “Ditengah-tengah merosotnya kepercayaan masyarakat atas kinerja DPR, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif lembaga legislatif DPR RI,”terangnya.

Pada akhir orasinya Marzuki berharap agar kegiatan “Sekolah Parlemen” ini dapat terus berjalan sebagai langkah sosialisasi terhadap masyarakat khususnya mahasiswa. “Manfaat dari kegiatan ini sangat banyak, kami

sebagai anggota DPR, menjadi lebih dekat dengan masyarakat, dapat menyerap aspirasi langsung dan tentunya membangun citra positif bagi DPR RI,”pungkasnya.

### Serap Aspirasi

Selesai memberikan orasinya, Marzuki menyempatkan untuk menerima perwakilan Mahasiswa dari HMI dan PMII korwil Universitas Brawijaya yang berdemo di luar gedung pertemuan. Aspirasi mahasiswa diantaranya seputar rencana pembangunan gedung, dijawab dengan jelas oleh Marzuki melalui pemaparan selama hampir satu jam. “DPR sekarang sangat terbuka, apapun yang ingin kalian ketahui, tidak akan kami tutupi. Silahkan meminta informasi kepada kami melalui unit pelayanan informasi dan tidak perlu datang jauh ke Jakarta, karena kami sudah melayani melalui system on line,”Jelas Marzuki, yang kemudian menemui semua pendemo di luar gedung. (Djst) foto:doc parle

\*\*\*

# Komisi II Bentuk Panja RUUK DIY



Ketua Komisi II DPR, Chaeruman Harahap

Komisi II DPR secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk dibahas lebih lanjut.

“Seperti yang telah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Mendagri. Selanjutnya kita akan membentuk Panja. Untuk mekanisme pembahasan kita telah sepakati dengan model pengklasteran,” kata ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap pada Rapat Kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri Gamawan Fauzi, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6).

Sementara, anggota Panja adalah perwakilan dari masing-masing fraksi yang ada di Komisi II DPR dengan jumlah proporsional. Mereka yang jadi anggota Panja adalah Ignatius Mulyono, Khatibul Umam Wiranu, Abdul Wahab Dalimunte, dan GRAY Koes Moertiyah (Fraksi Partai Demokrat).

Sementara, dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) adalah Basuki Tjahaja Purnama, Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus, Murad dan Agustina Basik-basik.

Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ada Alexander Litaay, Arif Wibowo, dan Eddy Mihati. Sementara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS) Almuzammil Yusuf, Agus Poernomo, dan Hermanto. Selain itu, Rusli Ridwan (F-PAN), Numan Abdul Hakim (F-PPP), Ida Fauziah (F-PKB), Harun Al Rasyid (F-Gerindra), dan Akbar Faizal (F-Hanura).

Sementara, dua anggota Panja lainnya dari Fraksi Partai Demokrat yakni Amrun Daulay dan Djufrie, akan diganti oleh anggota lainnya.(nt)foto:nt

# Ormas Asing Giliran Diundang Baleg

Organisasi Masyarakat (Ormas) asing giliran diundang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

lagi pilihan lembaga yang tepat jadi perlu pertimbangan. Perlu dipikirkan dengan baik masalah perdebatannya apakah di Kementerian Dalam Negeri,

**S**ebetulnya Baleg DPR RI mengundang beberapa Ormas asing seperti Green Peace, IFES, Transparancy Internasional, namun karena ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan mereka berhalangan hadir. The Asia Foundation menjadi satu-satunya ormas asing yang mewakili pertemuan pagi itu, Senin (13/6) di gedung DPR.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub, anggota Baleg dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menanyakan program-program apa saja yang dijalankan Asia Foundation sebagai ormas asing yang cukup lama bekerjasama di Indonesia.

Bukhori juga ingin mendapat masukan terkait dengan pendirian dan pembubaran ormas yang tidak bertentangan dengan kebebasan berorganisasi dan tidak melanggar hak asasi yang dijamin oleh konstitusi kita.

Lebih jauh dia juga menanyakan bagaimana mengatur agar transfer dana dari negara lain yang masuk ke Indonesia dapat diawasi dengan baik, mengingat Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kesulitan melacak dana transfer ini. Karena, katanya, jangan sampai negara kita dijadikan obyek money laundering dari transfer dana yang tidak dapat diawasi dengan baik.

Menanggapi hal itu, Herni Sri Nurbayanti, CSO Expert The Asia Foundation menjelaskan Asia Foundation salah satu LSM yang terdaftar di San Francisco yang bentuk organisasinya lebih menyerupai yayasan.

Ada beberapa bidang yang menjadi fokus The Asia Foundation diantaranya Pemilu Legislatif development, partisipasi perempuan dalam politik, penguatan masyarakat sipil. Dalam disain programnya, The Asia Foundation membuka partisipasi dari masyarakat Indonesia untuk mendisain program itu sendiri. "Jadi peran kita lebih banyak memfasilitasi," kata Herni.



Anggota Baleg dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf



Kapal Organisasi Greenpeace

Terhadap laporan kegiatan The Asia Foundation, Herni mengatakan masyarakat dapat mengakses setiap saat.

Sementara hal mengenai pembubaran dan sanksi dalam draft RUU Ormas, pihaknya meminta untuk melihat lagi aturan lain, karena ini terkait dengan pembubaran badan hukum. "Jangan sampai ada overlapping mengenai pembubaran badan hukum antara RUU ini dengan UU lain," katanya.

Herni mengatakan, jika sanksi sampai pada pembubaran ormas menurutnya itu akan menjadi isu yang dapat menimbulkan kontroversi, karena lagi-

Kementerian Hukum dan HAM atau di Pengadilan. Hal ini tentunya menjadi perdebatan yang perlu diselesaikan di DPR sendiri.

Sementara menjawab pertanyaan sekiranya ada keputusan melarang ormas asing beroperasi di Indonesia. Herni dengan tegas mengatakan, hal itu tentunya dikembalikan kepada masyarakat Indonesia sendiri. Karena dalam hal ini yang akan mendapatkan keuntungan dari program-program yang dijalankan ormas asing ini adalah masyarakat Indonesia sendiri. (tt) foto:ry/parle

\*\*\*

# Bambang Harimurti Ceroboh dan Sembrono

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pernyataan Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harimurti bahwa ada 1.000 wartawan di DPR yang bekerja sebagai pelobi dan tidak ada satu pun penghuni ruang wartawan di DPR memiliki profesi yang jelas adalah pernyataan ceroboh dan sembrono.



Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso (kanan)

“Pernyataan yang dilontarkan oleh seorang wartawan senior, yang menuding rekan-rekan wartawan di DPR sebagai orang yang tidak jelas profesinya adalah pernyataan sembrono dan ceroboh. Tegatenganya kok ada rekan wartawan memberikan penilaian seperti itu,” ujar Priyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/6).

Priyo menegaskan, dirinya seperti juga pimpinan DPR lainnya mengenal semua teman-teman wartawan di lingkungan DPR ini. Dirinya bahkan menyaksikan wartawan-wartawan DPR adalah wartawan-wartawan terbaik, yang dikirimkan oleh media masing-masing. Wartawan DPR adalah jenis orang gila kerja untuk ikut menjadi salah satu pilar demokrasi yang baik. Tanpa mereka tujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik tidak akan tercapai.

“Wartawan di DPR ini adalah wartawan-wartawan terbaik, seperti halnya wartawan di Istana Presiden, karena di sinilah sentral dari semua kegiatan politik dan bernegara. Menuding bahwa wartawan di DPR adalah orang-orang yang tidak jelas, tentunya

sangat tidak benar dan sangat tendensius,” tegasnya.

Dirinya mengharapkan Bambang mau mengoreksi pernyataannya itu. “Saya harap dia tidak ada maksud apa-apa dan hanya keseleo lidah saja dengan pernyataannya itu. Saya harap dia mau berbesar hati untuk meralat permintaannya dan meminta maaf, karena apa yang dikatakannya itu sama sekali tidak benar,” tambahnya.

Priyo sendiri mengakui, menghadapi wartawan-wartawan politik yang terbiasa bergaul dengan sejumlah politisi adalah hal yang sulit. Kalau salah-salah omong dan tidak jujur, maka narasumber pasti kelimpungan. “Dia seharusnya paham, politik saat ini adalah isu yang paling seksi dan hanya wartawan-wartawan DPR dan istana yang bisa memainkan itu dengan sangat cantik selama ini,” tegasnya.

## Punya Kartu Pers

Sementara itu, Karo Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI, Helmizar menegaskan bahwa wartawan yang meliput di DPR adalah wartawan yang memiliki kartu pers jelas dan harus

menyampaikan surat peliputannya ke Bagian Pemberitaan DPR RI dengan berkordinasi melalui Kordinatoriat Wartawan Press Room DPR. Artinya wartawan yang meliput di lingkungan DPR merupakan wartawan yang jelas dan memiliki media.

“Pembuatan ID tahunan press DPR RI bekerjasama dengan Kordinatoriat Wartawan DPR RI, dan tidak dibenarkan ID tersebut digunakan untuk memeras tamu, anggota DPR dsb. Karena itu pernyataan Bambang Harimukti yang menyatakan “Mereka punya pas (ID Card) khusus DPR yang bisa di bawa ke mana-mana untuk mencari duit” itu tidak benar,” jelasnya.

Seleksi mendapatkan ID card tahunan DPR RI menurutnya sangat selektif, Biro Humas dan Pemberitaan mengirim surat ke redaksi media cetak dan elektronik untuk meminta nama-nama yang ditugaskan menjadi wartawan parlemen. Biro Humas dan Pemberitaan selalu berkoordinasi dengan pengurus wartawan kordinatoriat DPR, untuk menentukan wartawan yang mendapatkan ID card tersebut.

Sementara mengenai tanggapan Bambang Harimukti perlu “menghidupkan kembali kepengurusan sekretariat wartawan di DPR. Namun yang menentukan kepengurusannya jangan BURT,” Kepengurusan Press Room DPR RI ditentukan oleh anggota press room secara demokratis dan tidak melibatkan BURT.

“Artinya dilakukan secara independen dan sudah berlangsung sejak kordinatoriat Press Room berdiri. Struktur kepengurusan Press Room ditentukan oleh kordinator yang terpilih secara demokratis dan melibatkan seluruh warga Press Room DPR RI,” tandasnya.

Sekretaris Koordinator Wartawan DPR RI, Jaka Suryo dari Kantor Berita

Antara mengatakan Bambang seharusnya meminta maaf kepada rekan-rekan wartawan dengan pernyataannya itu dan bukan malah memperkeruh suasana dengan pembelaan diri kembali menyalahkan rekan-rekan wartawan di DPR.

“Jelas kemarin dia berbicara bahwa ada 1.000 wartawan di DPR dan semua yang mengisi ruang pressroom di DPR adalah orang-orang dengan profesi tidak jelas. Kami di DPR tidak sebanyak itu hanya 137 anggota yang terdaftar dan tidak mungkin ada wartawan sam-

pai 1000 orang. Bukannya minta maaf malah meminta kami tidak perlu resah dengan pernyataannya itu, siapa yang tidak resah kalau mendengar pernyataannya itu. Dia menuding semua wartawan di DPR bodrek, itu jelas kemarin dia katakan,” jelas Jaka. (parle)

## Komisi II DPR Akan Pertanyakan Surat Palsu Andi Nurpati

Anggota Komisi II DPR RI, Al Muzammil Yusuf telah meminta Komisi II untuk segera membentuk Panitia Kerja pada rapat kerja sebelumnya antara Komisi II, KPU dan Bawaslu.

Hal ini menurutnya merupakan masalah besar bagi wibawa dan kredibilitas KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja Komisi II yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu. “Besok, selain mendengarkan keterangan KPU dan Bawaslu, saya akan mendesak kembali Komisi II agar segera membentuk Panitia Kerja untuk mengawal kasus ini.” Kata politisi senior dari Fraksi PKS ini, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Muzzamil menilai bahwa KPU dan Bawaslu adalah pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini. Ini merupakan pertarungan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berwibawa, profesional, dan independen. Publik bisa meragukan kerja KPU yang berimplikasi besar, “Jika KPU tidak dipercaya maka akan terjadi delegitimasi publik terhadap hasil pemilu, tentu hal ini berdampak sangat besar, untuk itu seharusnya anggota KPU yang lain tidak boleh melindunginya, jika Andi memang bersalah”. Ujarnya.

Muzzamil menambahkan kasus ini harus jadi cambuk bagi Bawaslu agar proaktif dan independen dalam melaporkan kasus pemilu, jangan kalah dengan MK. “Kasus ini harusnya yang melaporkan ke Mabes Polri adalah Bawaslu, bukan MK, karena Bawaslu tugas utamanya mengawasi penyelenggaraan pemilu dari awal sampai akhir”. Tambah Muzzamil.

Oleh karena itu, menurut Muzzamil, menjadi urgen untuk dilahirkannya sejenis badan kehormatan pe-

Komisi II DPR RI akan mempertanyakan surat palsu yang berujung pada kursi haram di DPR yang diduga melibatkan mantan anggota KPU, Andi Nurpati saat RDP dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR hari ini, Selasa, (14/6).



Anggota Komisi II DPR, Al Muzzammil Yusuf

ngawas pemilu yang bertugas untuk mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sehingga tidak terulang kasus sejenis.

Karena kasus ini sudah di Mabes Polri, Muzzamil mendesak agar Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan Ketua MK tersebut agar kasus ini tidak berlarut-larut, karena sudah satu tahun tanpa hasil yang berarti. “Kita patut waspada kenapa kasus ini diendapkan terlalu lama dan dibuka setelah Ketua MK berbicara di media”. Paparnya.

Selain itu Muzzamil meminta agar MK melakukan pemeriksaan awal terhadap stafnya yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada oknum staf atau hakim MK yang mengambil keuntungan dari kasus ini. “Saya minta MK memeriksa dengan jeli, apakah stafnya terlibat atau tidak, karena ini juga pertarungan

bagi kredibilitas MK?” Kata politisi dari daerah pemilihan Lampung ini.

Dalam pandangan Muzzamil kasus ini tentu akan merugikan partai politik yang berafiliasi dengan Andi saat ini, “Untuk itu saya menyarankan partai terkait agar mendukung usaha penyelesaian kasus ini di Mabes Polri secara fair dan sesegera mungkin”. Tegas Muzzamil.

Terkait adanya pandangan bahwa kasus ini sudah kadaluarsa, Muzzamil setuju dengan pandangan Mahfud MD bahwa kasus yang dilaporkan MK itu bukan sengketa pemilu, tapi kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen negara yang diancam hukum penjara. “Jadi harus dibedakan bahwa ini bukan sekedar kasus pemilu, tapi kasus pemalsuan dokumen negara, jika terbukti bersalah hukumannya 5-7 tahun penjara.” Kata Muzzamil. (si) foto:as/parle

# Komisi V Sepakat Perjuangkan Kenaikan Anggaran KPDT

Komisi V DPR RI sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal (KPDT). Pagu indikatif Kementerian PDT mendapatkan alokasi sebesar Rp 985,88 milyar dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan jajarannya, Selasa malam (7/6) di gedung DPR.

Dalam kesimpulan berikutnya, Yasti mengatakan, Komisi V DPR juga sepakat dengan Kementerian PDT dalam melanjutkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2012 dengan tetap mengedepankan keberlanjutan program dan skala prioritas yang ditetapkan Kementerian PDT dan masukan/aspirasi Anggota Komisi V DPR.

Terkait Program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal, Komisi V DPR juga sepakat untuk terlebih dahulu menetapkan nama kabupaten dan nama desa, sedangkan menu bantuan yang akan diberikan ditetapkan

berdasarkan kebutuhan riil hasil kesepakatan masyarakat desa.

Agenda rapat Komisi V dengan Kementerian PDT malam itu adalah pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2012 dan pembahasan awal Rencana Kerja KPDT 2012.

Menteri PDT Helmy Faishal Zaini menyampaikan dengan pagu indikatif sebesar Rp 985,879 milyar masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 814,100 milyar.

Menurut Helmy, tambahan alokasi anggaran dimaksud untuk mendukung pencapaian target kegiatan prioritas di 183 kabupaten tertinggal tahun 2012 yaitu pengembangan kebijakan pengelolaan komoditas unggulan di 100 kabupaten, pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan di 100 kabupaten.

Selain itu, juga untuk pengemba-

ngan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi infrastruktur sosial daerah tertinggal di 105 kabupaten, pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal 50 kabupaten, infrastruktur energi daerah tertinggal 85 kabupaten dan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 48 kabupaten.

Helmy menambahkan, target percepatan pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2014 diantaranya adalah pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 50 kabupaten, indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal mencapai 72,2, pertumbuhan ekonomi 7,1 persen dan pengurangan turun sebesar 2,2 persen per tahun.

Atas kekurangan anggaran ini, Suharso berharap dukungan Komisi V DPR terhadap usulan tambahan anggaran tersebut dalam rangka pencapaian rencana target kinerja 2012.(tt)foto:tt



Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan jajarannya

# Komisi III Minta MA Perbaiki Kinerja Sektor Non Yudisial

Sekretaris Mahkamah Agung diminta lebih memperhatikan kelangsungan reformasi yang dilakukan lembaga hukum tertinggi di negeri ini. Se jauh ini pengajuan anggaran belum menunjukkan korelasi dengan kinerja, ini terlihat pada kasus-kasus yang menjadi tontonan publik seperti dugaan suap hakim Syarifuddin.

“Kasus hakim Syarifuddin hanya gunung es, bagaimana reformasi di MA bisa mencegah hal-hal seperti ini. Bagaimana sekretaris

nerja MA disektor non yudisial ini, sepertinya tidak ada pembaharuan sama sekali,” lanjut Benny.

Syarifudin Sudding dari FP Hanura

didukung, karena masyarakat saat ini menunggunya.

Anggota Komisi III Yahdil Abdi Harahap secara khusus mempertan-



Ketua Komisi III DPR, Benny Kaharman

MA mencegah tidak terjadi jual beli kasus. Bagaimana membuat publik bisa segera tahu tahapan penanganan perkara di MA. Bagaimana distribusi, hambatan perkara, ini sudah berkali-kali disampaikan,” tandas Benny K. Harman dalam rapat pembahasan RKA K/L & RKP K/L Tahun 2012 dengan Sekretaris MA, Sekjen MK dan Asrena Polri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2012).

Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan dalam undang-undang telah diatur pembahasan anggaran basisnya adalah kinerja. Ia meminta sekretaris MA menyusun agenda kerja dikaitkan dengan proposal anggaran. DPR menurutnya patut menimbang ulang anggaran apabila agenda soal ini tidak menjadi perhatian. “Kita kecewa ki-

menekankan anggaran yang disetujui komisi fokusnya adalah untuk meningkatkan kinerja aparat. Ia menyayangkan masih banyak ketidakadilan yang terjadi ditengah masyarakat. “Kasus hakim Syarifuddin itu perlu kita pertanyakan sampai sejauh mana program berjalan efektif. Kasus lain anggaran disetujui untuk mendukung polisi memberikan pelayanan kenapa itu tidak terwujud?” imbuhnya.

Ia meminta seluruh anggota poksi benar-benar menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Wakil rakyat dari dapil Sulteng ini juga mengingatkan mitra kerja yang hadir untuk tidak melakukan upaya lobby di luar rapat dalam menggolkan anggaran. Baginya program apapun yang dapat merealisasikan perbaikan kinerja harus

yakan kepada Sekjen MK kenapa Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan program sosialisasi UUD 1945 kepada Partai Politik. Baginya kegiatan tersebut sangat efektif dan merupakan kesempatan melakukan sosialisasi penyelesaian sengketa pemilu. “Sosialisasi seperti ini penting, kenapa tidak diteruskan?” tanyanya.

Pimpinan sidang yang juga wakil ketua Komisi III Azis Syamsudin mengingatkan agar mitra kerja memperhatikan Tata Tertib DPR RI pasal 155 yang menerangkan seluruh pembahasan anggaran yang telah diputuskan pleno Komisi tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh Badan Anggaran. “Jadi lobby diluar rapat seperti yang disampaikan Pak Sudding tidak perlu dilakukan,” ujarnya. (iky)foto:iky

# Komisi V Desak Menpera Evaluasi Pemanfaatan Rusunawa

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat agar mengevaluasi pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) terkait banyaknya Rusunawa terbangun yang belum termanfaatkan. Komisi V DPR juga minta pembangunan Rusunawa baru pada APBN Tahun 2012 dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang diyakini kemanfaatannya.



Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Senin malam (6/6) di gedung DPR.

Rapat yang berlangsung hingga tengah malam itu mengagendakan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2012 dan penyampaian program-program kementerian terkait.

Pada kesimpulan selanjutnya, Komisi V DPR juga sepakat dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam melanjutkan penyusunan RKAK/L 2012 dengan tetap mengedepankan skala prioritas yang ditetapkan Kementeri-

an Perumahan Rakyat dan masukan /aspirasi Anggota Komisi V DPR.

Komisi V DPR juga mendesak kementerian ini untuk meningkatkan kuantitas dan alokasi anggaran untuk Program Perumahan Swadaya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan, usulan rencana kerja Kemenpera untuk memenuhi target RPJMN 2012 diusulkan sebesar Rp 5,8 triliun. Pagu indikatif setelah Trilateral meeting sebesar Rp 3,2 triliun ditambah Direktif Presiden pada saat Sidang Kabinet Rp 1,2 triliun, jumlah keseluruhan Rp 4,4 triliun. Dalam hal ini masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun.

Suharso menambahkan, salah satu dasar kebijakan penyusunan program Kemenpera adalah Kontrak Kinerja pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat (RSH) bersubsidi, 180 tower Rusunami dan 650 twin block Rusunawa berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga pada 2012.

Sementara Direktif Presiden diarahkan untuk peningkatan dan perluasan program pro rakyat klaster IV yaitu pembangunan rumah sangat murah dan rumah murah. Selain itu, juga untuk penanganan segera warga baru di kawasan perbatasan Nusa Tenggara

Timur dan Timor Leste.

Lebih jauh Suharso menjelaskan, Program Perumahan Pro Rakyat Kemenpera Tahun 2011-2014 direncanakan sejumlah 1.000.000 unit yang terdiri dari 350.000 unit rumah sangat murah dan 650.000 unit rumah murah.

Tahun 2011 ditargetkan yang akan diselesaikan 100.000 unit rumah, tahun 2012 300.000 unit rumah, 2013 direncanakan 300.000 unit rumah dan tahun 2014 sebanyak 300.000 unit rumah.

Rumah sangat murah dengan dana Bansos kurang lebih seharga Rp 5 – 10 juta, diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin seperti nelayan, petani, penggarap, buruh harian.

Rumah murah dengan harga jual diperkirakan Rp 20 – 25 juta diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil seperti wira usaha, pekerja kontrak dan rumah murah untuk pelaku usaha mikro dan kecil berdaya beli, diperkirakan harga jual Rp 20 – 25 juta dan Rp 55 – 70 juta yang diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri, Pekerja swasta Jam-sostek.

Kementeriannya, kata Suharso, akan mengevaluasi pembangunan rusunawa yang belum termanfaatkan dengan pembangunan rusunawa yang lebih selektif agar ke depan tidak terjadi lagi banyaknya rusunawa yang belum termanfaatkan.

Dalam kesempatan tersebut dia juga berharap dukungan Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan kekurangan anggaran kementeriannya agar dapat memenuhi target RPJMN 2012. (tt) foto:tt

\*\*\*

# Pemuda Dan Kewirausahaan

Harapan dan keinginan bangsa ini terhadap para pemuda memang cukup besar. Namun pada kenyataannya, banyak pemuda yang kurang menyadari tanggungjawabnya terhadap masa depan bangsa. Mereka justru masih harus didorong agar mampu mengembangkan diri menjadi sumberdaya manusia yang unggul agar memiliki peran signifikan bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pada tulisan saya kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pemuda.



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

**P**ertama, para pemuda wajib menyadari sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Masalah-masalah itu antara lain kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih ada di sebagian masyarakat kita, dan simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang goyah karena luntarnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, empat pilar dalam kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI perlu diangkat kembali untuk diimplementasikan. **Kedua**, para pemuda hendaknya tidak hanya pandai mengkritisi keadaan, namun juga harus cerdas mencari alternatif yang tepat dan yang paling mungkin dilaksanakan. Dengan memahami masalah-masalah tersebut, para pemuda tidak akan mudah menyalahkan, apalagi menganggap enteng kemampuan bangsa sendiri. **Ketiga**, organisasi pemuda dan kemahasiswaan secara umum, harus mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan, kemasyarakatan dan kebangsaan, sekaligus proaktif mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.



## Pengamatan terhadap Kondisi Kepemudaan

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan dan tenagakerjaan, relatif masih belum menggembirakan. Demikian pula kualitas pemuda dalam pendidikan. Data Susenas 2008 menunjukkan, sekitar 1,27% jumlah pemuda belum/tidak pernah sekolah; 17,34% masih/ sedang bersekolah; dan 81,40% sudah tidak bersekolah lagi.

Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika, premanisme, serta minimnya sarana dan prasarana kepemudaan dalam beraktivitas merupakan faktor yang turut memperbesar masalah kepemudaan. Dalam kategori Iptek, tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaannya sekaligus menekan ekses negatif dari

kemajuan Iptek. Ekses negatif muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan dalam produksi atau konsumsi pornografi sampai kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, pembajakan kartu kredit, penyebaran informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme, kekerasan, dan sebagainya.

Masalah berikutnya adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka. Menurut data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2008, tingkat pengangguran terbuka dari golongan pemuda lebih condong di perkotaan dibandingkan di perdesaan, yaitu 20,75% dibandingkan 15,3%. Penyebab ketimpangan angka pengangguran ini, karena lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi tenaga kerja yang ditawarkan, serta kompetensi dan kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja, tidak sesuai.



Persoalan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air merupakan faktor yang tidak kalah penting. **Munculnya orientasi yang berlebihan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis seputar kekuasaan juga menjadi masalah bagi pemuda.** Akibat orientasi ini, pemuda menjadi lemah dalam memelopori kegiatan-kegiatan di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerjaan sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga.

Dari pengamatan sebagaimana di atas, cukup jelas bagi kita kondisi pemuda Indonesia saat ini. Pertanyaannya adalah: **apakah pemuda kita mampu bangkit untuk Indonesia yang lebih maju, mandiri dan bermartabat?** Untuk menjawab itu semua, kita perlu merumuskan dan mencari terobosan, solusi kreatif, inovatif, mendorong peran pemuda bagi kemajuan dan kemandirian bangsa kedepan, untuk mewujudkan kemakmuran yang dicita-citakan.

### Bangkitkan Kewirausahaan Pemuda

Seorang Ilmuwan Amerika bernama David McClelland, pernah menjelaskan bahwa suatu negara disebut makmur jika mempunyai jumlah wirausahawan minimal 2% dari jumlah penduduknya. Namun, saat ini jumlah pengusaha Indonesia hanya 0,24% dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta, maka negeri ini membutuhkan setidaknya 4,2 juta pengusaha untuk mencapai minimal 2% jumlah usahawan.

Jumlah usahawan yang hanya 2% dari jumlah penduduk, artinya terdapat dua orang dari setiap 100 orang penduduk yang membuka lapangan pekerjaan. Ini berarti, 1 orang pengusaha menghidupi 49 orang lain yang bukan pengusaha. Angka ini akan melonjak menjadi 400-an orang yang harus ditanggung oleh seorang pengusaha jika saat ini baru terdapat 0,24% penduduk Indonesia yang menjadi wirausahawan. Jumlah ini tentu sangat tidak sebanding, dan menunjukkan beban penduduk yang harus ditanggung para pengusaha kita.

Pengusaha adalah pihak yang secara ekonomis menanggung elemen masyarakat lain yang bukan pengusaha. Untuk itulah, kita perlu membangkitkan jiwa kewirausahaan dan memulai sebuah bisnis (entrepreneur) yang mampu menanggung kehidupan diri dan kehidupan masyarakat. *Entrepreneurship* menjadi penting karena pengusaha pulalah yang menjadi ujung tombak perekonomian suatu negara. Merekalah yang memimpin dan menentukan jalan usahanya sesuai bidang industri masing-masing, yang sebetulnya ikut menentukan arah pergerakan ekonomi dan industri.

Melalui tulisan opini ini, saya menitipkan dua hal yang harus kita mulai dari sekarang, yakni **pertama**, di dalam diri pemuda perlu ditanamkan rasa nasionalisme, kebhinekaan, dan persatuan di tengah-tengah masyarakat. **Kedua**, mari kita maknai Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai Kebangkitan Ekonomi Nasional dengan meningkatkan produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian. Untuk itu, perlu di-

Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, dan Papua. **Ketiga**, Pemuda dituntut makin kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih agar, memiliki peluang yang besar untuk memainkan peran sebagai pelaku ekonomi potensial pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Globalisasi pada era sekarang menuntut kapasitas, kualitas dan profesionalitas dalam segala bentuk, termasuk di dunia usaha.

Kita perlu mengingatkan kembali bahwa, UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, telah mengamankan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, *entrepreneurship* sangat penting, ino-



garisbawahi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Enam wilayah koridor ekonomi, yaitu

vasi sangat penting sebagai penyangga sekaligus solusi dari pengurangan dan kemiskinan di negeri ini.\*

# Pemuda Harus Menjadi Bagian dari Solusi Bangsa

Ketua DPR RI Marzuki Ali mengajak para pemuda tidak terjebak sikap saling menyalahkan, dalam menghadapi permasalahan bangsa. Sebagai generasi penerus hendaknya mampu mempelajari memahami permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Dengan pemahaman yang benar pemuda diharapkan dapat menawarkan solusi.

“Kita jangan hanya pandai mengkritisi. Kritis itu penting tapi kita juga harus cerdas mencari solusi. Pemuda tidak boleh mudah saling menyalahkan. Kita harus jadi bagian dari solusi, jangan hanya mengkritisi dan pada akhirnya membuat masalah,” kata Marzuki dalam pidatonya pada acara pembukaan Rakernas II KNPI di Ternate, Maluku Utara, Jumat (10/6/2011).

Ia berharap KNPI sebagai organisasi kepemudaan dapat merespon persoalan pemuda dan kemasyarakatan. Diantaranya bagaimana menumbuhkan semangat kewirausahaan atau entrepreneurship. Baginya fakta yang ada saat ini sangat memprihatinkan, angkatan kerja baru cenderung hanya membangun mimpi menjadi pekerja atau karyawan. “KNPI dapat memotori bagaimana membangun semangat kewirausahaan ini,” imbuhnya.

Peluang kerja yang dapat disediakan pemerintah saat ini menurutnya terbatas. Walaupun target pertumbuhan ekonomi merangkak naik namun belum memadai. Marzuki menyebut setiap 1 persen pertumbuhan berarti peluang kerja baru terbuka bagi 400 ribu orang. Apabila pertumbuhan 6 persen, peluang kerja berkisar 2,4 juta, masih jauh dari jumlah angkatan kerja baru. Pilihan terbaik adalah bagaimana mendorong pemuda memiliki keberanian menjadi pengusaha yang malah mampu membuka kesempatan kerja.

Pada bagian lain Ketua DPR menekankan kehadirannya dalam acara Rakernas KNPI diharapkan dapat mendorong berlangsungnya rekonsiliasi organisasi. Kehadiran di Ternate sebagai bentuk perhatian kepada para pemuda. Baginya selama jadwal memungkinkan ia pasti akan datang memenuhi undangan, tanpa melihat

organisasi besar atau kecil.

Sementara itu wakil gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba mengatakan posisi pemuda dalam sejarah bangsa selalu menentukan. Mulai dari era nabi dan rasul, masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, sampai proses reformasi. Salah satu hasil reformasi yang diperjuangkan pemuda dan mahasiswa adalah tidak akan ada lagi pemimpin berani berkuasa 10 atau 20 tahun. Hanya saja ia melihat pada kondisi sekarang kaum muda cenderung kurang sabar.

“Dalam era reformasi ini pemuda jangan terlalu memaksakan, terlalu mudah teriak turun, tidak usah ditarik turun karena pada saatnya akan turun sendiri,” katanya. Ia juga menyebutkan KNPI saat ini dalam episode menghadapi tantangan besar dalam organisasi. Namun bila mampu menahan diri insyaAllah akan melahirkan pimpinan besar dimasa datang. “Tantanganlah yang membuat seseorang besar.”

Ketua Umum KNPI Ahmad Dolly

Kurnia dalam sambutannya menyampaikan konsolidasi organisasi yang di pimpinnya terus berjalan. Komitmen untuk merangkul dan mencari titik temu dengan organisasi kepemudaan lain akan terus dijalankan. Sesuai dengan tema Rakernas II ‘Revitalisasi Gerakan Kepemudaan Menuju Kemandirian Bangsa, Menyongsong Satu Kongres, Satu Pemuda, Satu KNPI’

Pada bagian lain ia memberikan apresiasi kepada Ketua DPR yang berkenan hadir dalam rakernas yang berlangsung di Malut. Baginya kehadiran ketua wakil rakyat seakan seluruh rakyat yang diwakili hadir dalam rakernas kali ini. Ia berharap kepemimpinan Marzuki Ali di DPR dapat memenuhi rasa dahaga masyarakat akan pemimpin yang berkarakter. “Kepemimpinan yang berkarakter akan melahirkan manusia Indonesia yang bermartabat. Mampu menghadirkan kembali kewibawaan bangsa yang hilang,” tandasnya. (iky) foto:iky/doc parle



Ketua DPR RI Marzuki Ali berpidato pada acara pembukaan Rakernas II KNPI di Ternate, Maluku Utara

# Saksikan...!!

## *Cempala* di TVRI



Episode 4

Tjatur Sapta Edy (komisi III DPR)  
Muslim Abdullah (Wakil Ketua PP Muhammadiyah),  
Sabtu, 25 Juni 2011, Pukul 21.00 WIB

## *Cempala*

Episode 5

Guntur Saseno (Komisi I DPR)  
Prof. Muladi (Mantan Gubernur Lemhanas)  
Sabtu, 9 Juli 2011 Pukul 21.00 WIB

## *Cempala*

Episode 6

Harry Azhar Azis (Komisi XI DPR)  
DR. Mirza Aditya (Pengamat Ekonomi),  
Sabtu, 23 Juli 2011, Pukul 21.00 WIB

Jangan lewatkan Talk Show RUU P3 di TVRI, Selasa, Pukul 21.00 WIB  
Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di 08119443344  
Layanan Informasi Publik di [www.ppid.dpr.go.id](http://www.ppid.dpr.go.id)